

Bahasa dan Hegemoni Neoliberalisme dalam Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Fairclough tentang Wacana dan Praktik Sosial

Alfin Luluk Kamalia, Ayu Khairiyah, Yusak Hudiyono, Widyatmiko Gede Mulawarman

Universitas Mulawarman

Alfinkamalia467@gmail.com

Ayukhairiyah88@gmail.com

ABSTRACT

The School of Movement program seeks to realize a holistic education encompassing students' cognitive, character, and personality development. This initiative includes the implementation of a project-based curriculum based on the Pancasila student profile, teacher and principal training, mentoring, and the use of technology. However, Norman Fairclough's critical discourse analysis and the concept of neoliberal hegemony demonstrate that the language used in the School of Movement discourse (e.g., the emphasis on "competence" and "innovation") can subtly replicate results-oriented market values, potentially obscuring broader character development goals. Furthermore, initiatives such as the provision of technology platforms can reinforce existing social structures if access is unequal, widening the digital and socioeconomic divide. Finally, capitalist control can manifest itself through a managerial approach to teacher and principal training, as well as an emphasis on job-relevant skills within the project-based curriculum.

Keywords: *The Driving School, Norman Fairclough, Discourse Analysis and Social Practice*

INTISARI

Program sekolah penggerak berupaya mewujudkan pendidikan holistik yang mencakup kognitif, karakter dan kepribadian siswa. Inisiatif tersebut meliputi implementasi kurikulum berbasis profil pelajar pancasila, pelatihan guru dan kepala sekolah, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi. Namun, analisis wacana kritis Norman Fairclough serta konsep hegemoni neoliberalisme. Analisis menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam diskursus Sekolah Penggerak (misalnya, penekanan pada "kompetensi" dan "inovasi") secara halus dapat mereplikasi nilai-nilai pasar yang berorientasi hasil, berpotensi mengaburkan tujuan pengembangan karakter yang lebih luas. Selain itu, inisiatif seperti penyediaan platform teknologi dapat memperkuat struktur sosial yang ada jika akses tidak merata, memperlebar kesenjangan digital dan sosial-ekonomi. Terakhir, kontrol kapitalistik dapat termanifestasi melalui pendekatan manajerial dalam pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penekanan pada keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dalam kurikulum berbasis proyek.

Kata Kunci: Sekolah Penggerak, Norman Fairclough, Analisis Wacana dan Praktik Sosial

PENDAHULUAN

Program sekolah penggerak adalah program yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak (Mazidah et al., 2025)

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kebijakan Sekolah Penggerak dibuat. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing semakin penting di tengah arus globalisasi dan persaingan global. Ketika berbicara tentang kebijakan, wacana tentang kata-kata seperti "kemandirian sekolah", "fleksibilitas", "inovasi", dan "kewirausahaan" seringkali menjadi bahan percakapan. Namun, penting untuk mempertimbangkan lebih dalam apakah diskusi tersebut mengarah pada prinsip-prinsip pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan atau sebaliknya terpengaruh oleh ideologi neoliberalisme yang menekankan logika pasar, efisiensi, dan individualisme.

Maret 2020 sudah ada 4 kebijakan belajar yang diluncurkan Mendikbud yang disebut dengan Merdeka Belajar episode 1 hingga episode 4, kebijakan ini dinamakan program organisasi penggerak yang memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu: (1) mendorong lahirnya ribuan Sekolah Penggerak, (2) sasaran program hingga 2022 untuk 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP (sederajat), (3) diberikan pada organisasi penggerak dengan kategori tertentu berdasarkan rekam jejak organisasi, (4) monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dan program sesuai (Novayanti et al., 2023).

Berdasarkan data dari laman Kemendikbud untuk peserta sekolah penggerak yang ada di Indonesia berjumlah 18.872 sekolah. Sekolah penggerak ini dilaksanakan oleh berbagai jenjang baik dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK baik dari sekolah Negeri maupun sekolah Swasta. Dengan angkatan pertama berjumlah 4.997 sekolah dan angkatan ke-2 adalah 13.875. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Peserta Sekolah Penggerak dan gambar 1 Status sekolah peserta sekolah penggerak (Rahmah & Megawati, 2024).

Di dunia pendidikan pasti juga ada kebijakan yang digunakan sebagai cara dan metode agar Pendidikan dapat berkembang. Prabawati, dkk menyebutkan bahwasannya kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan tujuan maupun sasaran tertentu yang diharapkan. Hal tersebut berarti terdapat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan tujuan di dunia pendidikan. Rivani & Megawati menyebutkan bahwa dalam memutuskan kebijakan dibutuhkan suatu komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut untuk memecahkan permasalahan serta target yang diharapkan dapat tercapai (Astuti et al., 2024). Oleh karena itu demi tercapainya tujuan bangsa dalam mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan anak-anak menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia. Hal ini mendorong Menteri Pendidikan untuk membuat Program Sekolah Penggerak.

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial budaya tertentu. AWK tidak hanya memandang wacana sebagai bentuk praktik bahasa semata, melainkan juga sebagai praktik sosial yang terkait dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang lebih luas (Purba et al., 2024). Norman Fairclough berusaha mengembangkan konsep wacana dengan mengintegrasikan sejumlah tradisi ilmiah, seperti linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi (Media, 2025). Dalam kerangka teorinya, Fairclough memperkenalkan model diskursus yang terdiri dari tiga dimensi utama: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Setiap dimensi ini memiliki cakupan dan prosesnya sendiri, dan ketiganya saling terkait secara dinamis. Teks, sebagai dimensi pertama, mencakup produk akhir dari proses produksi wacana, termasuk pilihan bahasa dan struktur kalimat.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Astuti et al., 2024).

Metode analisis wacana kritis (AWK), yang diciptakan oleh Norman Fairclough, digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih peneliti karena kemampuannya untuk mengintegrasikan praktik sosial (pengaruh kebijakan dalam konteks sosial), praktik diskursif (cara kebijakan dibicarakan dan diinterpretasikan), dan teks (kebijakan). Peneliti akan menganalisis bagaimana wacana neoliberalisme diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam berbagai konteks.

Neoliberalisme versi Hayek dan Friedman menitikberatkan pada kebebasan individu yang tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan yang kohesif seperti negara. Kebebasan individu membawa setiap individu dapat bersaing secara sehat di pasar bebas tanpa penipuan atau paksaan. Hal inilah yang membentuk argumen bahwa kebebasan ekonomi adalah sarana dan kapitalisme adalah prasyarat untuk meraih kebebasan politik (Prasetyo, 2024)

HASIL PENELITIAN

Bahasa bukan hanya alat komunikasi, namun juga sebagai cermin dan pembentukan struktur sosial. Saat seseorang berbicara atau berdialog menggunakan bahasa dan kosa kata yang dikuasai ering kali mencerminkan posisi dalam hierarki sosial. Dalam Sekolah Penggerak, kurikulum berbasis proyek yang menekankan profil pelajar Pancasila bisa memanfaatkan bahasa untuk mendorong inklusivitas. Proyek yang melibatkan diskusi dan kolaborasi bisa mendorong siswa untuk menggunakan bahasa secara aktif, merefleksikan keragaman latar belakang, dan menghargai perbedaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan bahasa dalam proyek ini tidak malah memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi jembatan. Serta struktur sosial yang mempengaruhi siapa yang memiliki akses ke jenis pendidikan tertentu dan bagaimana bahasa akan diajarkan, yang dimana kedepannya akan mempengaruhi ekonomi dalam sistem kapitalis.

Bahasa dalam Diskursus Sekolah Penggerak:

Teks: Perhatikan penggunaan kosakata dalam dokumen resmi, panduan, atau komunikasi terkait Sekolah Penggerak. Apakah ada penekanan pada kata-kata seperti "kompetensi," "akselerasi," "efisiensi," "hasil," "inovasi," "platform digital," atau "daya saing"? Penggunaan istilah-istilah ini bisa menjadi indikator wacana neoliberal. Praktik Diskursif: Bagaimana pesan Sekolah Penggerak dikomunikasikan? Apakah ada narasi yang menyoroti perlunya "memajukan" pendidikan agar "siap bersaing" di era global? Siapa aktor-aktor yang dominan dalam menyuarakan narasi ini (misalnya, Kementerian, lembaga swasta, perusahaan teknologi)? Praktik Sosial: Jika wacana Sekolah Penggerak secara konsisten menggunakan bahasa yang menekankan kompetensi, efisiensi, dan hasil terukur, ini dapat berkontribusi pada normalisasi gagasan bahwa pendidikan utamanya adalah investasi ekonomi. Bahasa ini menjadi bagian dari bagaimana hegemoni neoliberal direproduksi dan diterima.

Struktur Sosial dan Neoliberalisme:

Fairclough berargumen bahwa bahasa membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial. Dalam hegemoni neoliberal, struktur sosial cenderung menjadi lebih terstratifikasi berdasarkan kemampuan ekonomi. Sekolah Penggerak, meskipun bertujuan holistik, perlu dianalisis apakah inisiatifnya secara tidak sengaja memperkuat struktur sosial ini.

Misalnya, penyediaan platform teknologi untuk mendukung pembelajaran. Jika akses terhadap teknologi ini tidak merata (karena kendala ekonomi, infrastruktur, atau literasi digital orang tua/siswa), maka inisiatif ini, yang pada permukaannya terlihat progresif, justru bisa memperlebar kesenjangan sosial. Hanya siswa dari latar belakang yang lebih mampu secara ekonomi yang dapat sepenuhnya memanfaatkan sumber daya digital, sehingga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial yang sudah timpang.

Fokus pada "penguatan kompetensi" dapat diinterpretasikan sebagai penyiapan siswa untuk pasar kerja yang kompetitif, yang merupakan ciri khas neoliberalisme. Ini bisa saja mengurangi fokus pada dimensi karakter dan kepribadian yang lebih luas, jika implementasinya lebih mengutamakan aspek kognitif yang mudah diukur.

Kontrol Kapitalistik terhadap Pendidikan dan Hegemoni:

Pelatihan intensif bagi guru dan kepala sekolah, jika pelatihan ini menekankan "manajerialisme" sekolah, akuntabilitas berbasis data kuantitatif (misalnya, peningkatan nilai rata-rata, tingkat kelulusan), dan efisiensi operasional, maka ini adalah bentuk internalisasi nilai-nilai kapitalistik ke dalam praktik pendidikan. Guru dan kepala sekolah didorong untuk berpikir sebagai "pelaku pasar" atau "manajer" daripada sebagai pendidik dalam pengertian yang lebih luas.

Pendampingan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi, perlu ditelaah apakah lembaga pendidikan tinggi yang terlibat juga telah terpengaruh oleh tekanan neoliberalisme (misalnya, melalui penekanan pada penelitian yang menghasilkan paten, publikasi di jurnal terindeks tinggi yang seringkali berbayar, atau kemitraan dengan industri). Jika demikian, pendampingan ini bisa saja menyalurkan ideologi yang sama ke Sekolah Penggerak.

Kurikulum berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, meskipun niatnya positif untuk mengembangkan karakter, perlu diwaspadai apakah proyek-proyek ini akhirnya bergeser menjadi "pelatihan keterampilan" yang berorientasi pasar, misalnya, proyek yang fokus pada "kewirausahaan" atau "solusi inovatif" yang secara implisit mengadopsi logika bisnis. Jika konsep "profil pelajar Pancasila" juga diinterpretasikan dalam kerangka yang terlalu instrumental (misalnya, siswa yang "mandiri" diartikan sebagai individu yang mampu bersaing di pasar kerja), ini juga bisa menjadi manifestasi hegemoni neoliberal.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, program sekolah penggerak merupakan sebuah tujuan yang mulia untuk mengembangkan hasil belajar yang mencakup kompetensi kognitif, karakter dan kepribadian. Namun dalam pandangan analisis Wacana Kritis (CDA) Norman Fairclough dan konsep hegemoni neoliberalisme peneliti dapat melihat potensi kerumitan serta tantangan yang sangat berdampak.

Bahasa memainkan peran krusial. Dalam wacana Sekolah Penggerak, penggunaan istilah seperti "kompetensi," "akselerasi," "efisiensi," "inovasi," dan "platform digital" perlu dicermati. Meskipun istilah ini netral, dalam konteks hegemoni neoliberalisme, mereka bisa secara tidak sadar mempromosikan nilai-nilai pasar, di mana pendidikan diukur dari "hasil" yang terukur dan relevan dengan ekonomi. Jika bahasa yang digunakan secara dominan mengarah pada narasi persaingan dan profit, maka ia berisiko mengikis fokus holistik pada pengembangan karakter dan kepribadian yang menjadi inti program ini.

Struktur sosial yang ada dapat berpotensi diperkuat oleh implementasinya. Misalnya, penyediaan platform teknologi yang canggih, meskipun baik, bisa memperlebar kesenjangan jika akses terhadap teknologi dan literasi digital tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih baik akan lebih mudah beradaptasi dan memanfaatkan sumber

daya ini, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi mereka dalam hierarki sosial yang sudah ada.

Kontrol kapitalistik terhadap pendidikan tidak selalu eksplisit, melainkan seringkali terselubung dalam bentuk hegemoni. Pelatihan intensif bagi guru dan kepala sekolah yang terlalu fokus pada manajerialisme dan akuntabilitas berbasis data kuantitatif dapat menggeser peran pendidik menjadi "manajer" sekolah, yang sejalan dengan logika bisnis. Demikian pula, meskipun kurikulum berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila sangat positif, jika proyek-proyek ini akhirnya didorong menuju pengembangan keterampilan yang semata-mata berorientasi pasar (misalnya, terlalu menekankan kewirausahaan tanpa diimbangi dimensi etika dan sosial yang kuat), maka nilai-nilai neoliberalisme telah meresap ke dalamnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, A. N., Egar, N., & Abdullah, G. (2024). Analisis Kebijakan Program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami Temanggung. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(1), 123–132. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i1.201>
- Mazidah, N., Handayani, R., Raudah, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK OLEH DINAS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1019–1029.
- Media, D. (2025). *Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Demo*. 3.
- Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3(1), 151–160. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2965>
- Prasetyo, K. C. (2024). Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32734/ljisp.v3i1.15810>
- Purba, A., Rahmadani, P., & Sari, S. (2024). Analisis Wacana Kritis Fairclough Dalam Teks Iklan Sprite 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2185–2191. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3158>
- Rahmah, L. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi Program Sekolah Penggerak Di Sd Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 147–159. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p147-159>